

## ANALISIS KINERJA ANGGARAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA JAMBI DI LIHAT DARI PERSPEKTIF AKUNTABILITAS

**Sri Rahayu, Ilham Wahyudi dan Yudi**

*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Jambi  
Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat, Jambi 36361*

### Abstrak

Penelitian ini berjudul Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi dilihat dari Perspektif Akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja anggaran keuangan daerah pemerintah Kota Jambi yang dilihat dari perspektif akuntabilitas dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan untuk mengukur derajat desentralisasi, tingkat ketergantungan keuangan daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah serta mengukur efisiensi dan efektifitas penerimaan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat derajat desentralisasi keuangan daerah Kota Jambi masih sangat rendah, tingkat ketergantungan keuangan daerah masih tinggi dan tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah. Dari sisi penerimaan daerah dilihat dari efisiensi dan efektivitas PAD sudah efisien dan efektif.

*Kata kunci : kinerja anggaran, kota Jambi, akuntabilitas*

### PENDAHULUAN

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia merupakan isu menarik untuk diamati dan dikaji. Kronologis perubahan Undang-undang otonomi daerah sudah mengalami delapan kali penyempurnaan, dimulai dari UU no. 1 tahun 1945 hingga UU no.32 tahun 2004. Saat ini Bangsa Indonesia sedang berada pada masa transisi pemerintahan dari sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menuju sistem pemerintah yang bersifat desentralistik sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Otonomi tersebut bersifat luas karena kewenangan justru berada pada daerah (seperti pada Negara federal), disebut nyata karena kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan disebut bertanggungjawab karena kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah (Surbakti, 2001). Hal itu untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat agar semakin baik, kehidupan yang demokratis, adil, merata dan

hubungan yang serasi dalam Republik Indonesia (Pristwanto, 2001).

Kedua UU tersebut juga memberikan makna otonomi atau desentralisasi yang tegas dan sesuai dengan makna asli yang terkandung di dalamnya, yaitu kebebasan, *self independence* dan *dispersion of power* dari pada UU No. 5 tahun 1974 sehingga dalam kerangka formulasi dan implementasi otonomi, yang dituntut oleh daerah-daerah sebenarnya adalah adanya keadilan, baik keadilan yang menyangkut permasalahan pembagian dan penggunaan kewenangan maupun yang berkenaan dengan keuangan dan pendapatan. Karena selama ini, dalam hal kewenangan dan keuangan selalu terletak di tangan pemerintah pusat, sehingga daerah hanyalah sebagai pelaksana saja (Affandi, 2001).

Transparansi atau keterbukaan yang sangat diperlukan oleh publik adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang harus didukung oleh sistem akuntansi pemerintah yang mampu menyediakan informasi untuk tujuan pertanggungjawaban (*stewardship and accountability*), mengontrol dan pengawasan/pengendalian manajemen pemerintah daerah (Nurkholis, 2000).

Transparansi pengelolaan keuangan pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sedangkan pengendalian berarti penerimaan dan pengeluaran harus sering dimonitor, dengan cara membandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai (Affandi, 2001).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Salah satu bentuknya adalah kinerja anggaran (APBD). Anggaran merupakan komponen penting yang menjadi perhatian publik. APBD memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja (Mahmudi, 2006:121). Penilaian kinerja APBD sangat penting dalam kerangka menuju penguatan otonomi daerah dengan *new game* dan *new rule*-nya (Mardiasmo, 2004).

## METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Jambi dengan objek penelitian Pemerintah Daerah Kota Jambi.

### Metode Penelitian

Kajian ini merupakan kajian deskriptif kuantitatif yang dilakukan di Kota Jambi.

### Jenis Data.

Data yang digunakan adalah data sekunder, digunakan pula data primer guna mendukung pencapaian tujuan dari kajian. Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan analisis rasio kinerja yang terdiri dari kinerja pendapatan, kinerja belanja dan kinerja pembiayaan

### Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi

### Teknik Analisis

Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan analisis rasio kinerja yang terdiri dari kinerja pendapatan, kinerja belanja dan kinerja pembiayaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi. Unit pengamatan yang ditetapkan adalah Pemerintah Kota Jambi dan unit analisisnya adalah aparat yang bertanggung jawab menyusun anggaran pada setiap satuan kerja.

Kota Jambi yang menjadi unit observasi ini merupakan ibu kota Propinsi Jambi yang secara geografis terletak antara  $0^{\circ} 45^1$  sampai  $2^{\circ} 45^1$  lintang selatan dan antara  $101^{\circ} 10^1$  sampai  $104^{\circ} 55^1$  bujur timur. Berbatasan dan dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi dengan luas wilayah  $205,27 \text{ km}^2$  atau menempati 0,41% dari total keseluruhan luas Propinsi Jambi. Terbentuknya Kota Jambi seiring dengan lahirnya Propinsi Jambi yang sebelumnya merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 6 Januari 1957.

### Analisis Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Kota Jambi dilihat dari Perspektif

#### Akuntabilitas

Pada penelitian Kinerja Anggaran keuangan daerah Kota Jambi, peneliti menggunakan beberapa analisis Rasio Keuangan Daerah yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat Desentralisasi Kota Jambi untuk tahun 2001-2008 dapat dilihat pada Tabel. 1.

Tabel .1. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi KOTA JAMBI TAHUN 2001-2008

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi
2008	54,075,188,473.39	593,040,247,808.79	9.12%
2007	45,418,865,308.69	522,838,080,269.29	8.69%
2006	43,323,298,454.14	466,480,992,050.01	9.29%
2005	35,947,627,688.80	334,669,800,362.93	10.74%
2004	32,096,106,601.02	300,996,160,859.47	10.66%
2003	23,414,799,096.16	270,085,493,013.33	8.67%
2002	18,796,320,380.57	203,129,621,544.98	9.25%
2001	15,091,877,627.07	155,550,849,374.64	9.70%
Rata-Rata			9.52%

*Derajat Desentralisasi = PAD/Total Pendapatan Daerah*

Dari tabel perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Sarolangun tahun 2001-2008, dapat dilihat bahwa tingkat desentralisasi fiskal Kota Jambi masih sangat rendah. Rata-rata derajat desentralisasi tahun 2001-2008 hanya 9.52 %. Kedepan, Kota Jambi harus berusaha untuk terus meningkatkan PAD-nya melalui penggalian potensi-potensi baru daerah dan pengembangan potensi daerah yang sudah ada.

#### Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi. Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah tersebut pada pemerintah atasan. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Jambi untuk tahun 2001-2008 dapat dilihat pada Table .2.

Berdasarkan pada tabel perhitungan Rasio

Ketergantungan Keuangan daerah Kota Jambi tahun 2001-2008, dapat dilihat bahwa tingkat ketergantungan fiskal Kota Jambi masih sangat tinggi. Rata-rata tingkat ketergantungan keuangan Kota Jambi tahun 2001-2008 adalah 87.03%. Ini berarti bahwa Kota Jambi masih sangat tergantung dengan dana perimbangan dari pusat dan propinsi untuk menjalankan kegiatan pembangunan didaerahnya. Kedepan, Kota Jambi harus berusaha untuk terus meningkatkan PADnya untuk mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerahnya. Semakin rendah tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap dana transfer menunjukkan tingginya kemampuan penghasilan daerah tersebut untuk membiayai pembangunan di daerahnya.

#### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah.

Tabel .2. Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah KOTA JAMBI TAHUN 2001-2008

Tahun	Dana Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan
2008	503,237,017,811.00	593,040,247,808.79	84.857%
2007	455,407,746,287.00	522,838,080,269.29	87.103%
2006	420,590,220,655.87	466,480,992,050.01	90.162%
2005	292,739,782,672.45	334,669,800,362.93	87.471%
2004	254,879,837,758.45	300,996,160,859.47	84.679%
2003	227,940,185,033.17	270,085,493,013.33	84.396%
2002	184,333,301,164.41	203,129,621,544.98	90.747%
2001	135,010,920,928.57	155,550,849,374.64	86.795%
Rata-Rata			87.03%

*Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah = Dana Transfer/Total Pendapatan Daerah*

Tabel .3. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Jambi Tahun 2001-2008

Tahun	Dana Transfer	PAD	Rasio Kemandirian
2008	503,237,017,811.00	54,075,188,473.39	10.75%
2007	455,407,746,287.00	45,418,865,308.69	9.97%
2006	420,590,220,655.87	43,323,298,454.14	10.30%
2005	292,739,782,672.45	35,947,627,688.80	12.28%
2004	254,879,837,758.45	32,096,106,601.02	12.59%
2003	227,940,185,033.17	23,414,799,096.16	10.27%
2002	184,333,301,164.41	18,796,320,380.57	10.20%
2001	135,010,920,928.57	15,091,877,627.07	11.18%
Rata-Rata			10.94%

*Rasio Kemandirian Keuangan Daerah= PAD/Dana Transfer*

Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Jambi untuk tahun 2001-2008 dapat dilihat pada Tabel 3.

Dari tabel perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan daerah Kota Jambi tahun 2001-2008, dapat dilihat bahwa tingkat Kemandirian keuangan daerah Kota Jambi masih sangat rendah. Rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Jambi tahun 2001-2008 adalah 10.94%. Ini berarti bahwa Penyelenggaraan desentralisasi di Kota Jambi masih sangat tergantung pada dana transfer dari pusat dan propinsi. Untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah, maka Kota Jambi harus semaksimal mungkin meningkatkan PADnya.

#### **Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Penerimaan Kota Jambi**

Efisiensi dan efektivitas anggaran penerimaan sangat penting. Pada penelitian ini

efisiensi dan efektivitas anggaran penerimaan diukur dari efisiensi dan efektivitas PAD

#### Rasio Efektivitas PAD

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki (Halim, 2001:158). Jadi efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%. Rasio Efektivitas PAD Kota Jambi untuk tahun 2001-2008 dapat dilihat pada Table 4. Dari tabel perhitungan efektivitas PAD Kota Jambi tahun 2001-2008, dapat dilihat bahwa PAD Kota Jambi sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata tingkat efektivitas PAD Kota Jambi tahun 2001-2007 adalah 124.18%. Tingkat efektivitas PAD tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar

Tabel .4. Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kota Jambi Tahun 2001-2008

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas PAD
2008	54,075,188,473.39	45,034,596,937.95	120.07%
2007	45,418,865,308.69	38,091,111,699.00	119.24%
2006	43,323,298,454.14	34,886,577,274.00	124.18%
2005	35,947,627,688.80	31,020,175,426.00	115.88%
2004	32,096,106,601.02	26,005,893,206.00	123.42%
2003	23,414,799,096.16	19,590,117,000.00	119.52%
2002	18,796,320,380.57	18,245,610,000.00	103.02%
2001	15,091,877,627.07	15,253,906,000.00	98.94%
Rata-Rata			115.53%

*Rasio Efektivitas PAD= Realisasi PAD/Target PAD*

Tabel. 5.. Perhitungan Rasio Efisiensi PAD Kota Jambi Tahun 2007-2008

Tahun	Realisasi PAD	Biaya Pemerolehan PAD	Rasio Efektivitas PAD
2008	54,075,188,473.39	2,956,540,000	5.47%
2007	45,418,865,308.69	2,167,791,000	4.77%

*Rasio Efisiensi PAD= Biaya Pemerolehan PAD/Target PAD*

152,60%. Sedangkan tingkat efektivitas PAD terendah terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 98.94%.

#### Rasio Efisiensi PAD

Rasio efektivitas yang tinggi juga harus dibandingkan dengan rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini semakin baik). Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di Laporan Realisasi Anggaran, yaitu data tentang biaya pemungutan PAD. Rasio Efisiensi PAD Kota Jambi untuk tahun 2007-2008 dapat dilihat pada tabel 5.

Dari tabel rasio efisiensi PAD 2007-2008 dapat diketahui bahwa kinerja APBD Kota Jambi dari sisi efisiensi PAD sangat efisien.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

1. Kinerja anggaran keuangan Kota Jambi dilihat dari perspektif akuntabilitas, untuk tingkat derajat desentralisasi tahun 2001-2008 rata-rata 9.52%, tingkat ketergantungan keuangan daerah tahun 2001-2008 rata-rata 87.03% dan tingkat kemandirian keuangan daerah tahun 2001-2008 rata-rata sebesar 10.94%.
2. Efektifitas anggaran penerimaan Kota Jambi tahun 2001-2008 sudah efektif dengan tingkat rata-rata sebesar 115.52%. Sedangkan efisiensi anggaran penerimaan Kota Jambi tahun 2007-2008 sangat

efisien yaitu tahun 2007 sebesar 4.77% dan tahun 2008 sebesar 5.47%.

#### **Saran**

1. Untuk meningkatkan derajat desentralisasi, menurunkan tingkat ketergantungan keuangan daerah dan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah maka pemerintah daerah Kota Jambi harus berusaha meningkatkan PAD dengan usaha ekstensifikasi dan intensifikasi PAD.
2. Pemerintah Kota Jambi harus terus mempertahankan tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran penerimaan daerahnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Affandi, Nur Achmad. 2001. Strategi Pengembangan Akuntansi Pusat dan Daerah. [www.otoda.or.id](http://www.otoda.or.id)
- Bastian. I. 2006. Akuntansi Sektor Publik; Suatu Pengantar. Erlangga. Jakarta
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi I, Salemba Empat, Jakarta
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik., Salemba Empat, Jakarta
- Kuncoro.M. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Erlangga. Jakarta.
- Mahmudi. 2006. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pandangan untuk eksekutif, DPRD dan masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Nurkholis. 2000. Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Pemerintahan menyongsong Otonomi Daerah. [www.otoda.or.id](http://www.otoda.or.id)
- Setyawan.S. 2003. Pengukuran Kinerja

- Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang. *Balance*. Agustus 1:103-114
- Sukiadi. H.T.2001. Penyiapan SDM Perbankan dalam Penyempurnaan Pelaporan Kepada Masyarakat (Studi Kasus BPD). Makalah disampaikan pada Konvensi Nasional Akuntansi Sektor Publik I Semarang
- Surbaki R. 2001. Otonomi daerah seluas-luasnya dan Faktor Pendukung. [www.otoda.or.id](http://www.otoda.or.id)
- Ulupui. I.G.K.A 2003. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Persepsi Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural dan Goal Commitment terhadap Kinerja Dinas. Tesis. Universitas Gajahmada. Yogyakarta.
- Yuwono.S.ET, Agus dan Hariyandi.2005. Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD. Bayu media. Malang.